

ANALISIS KELAYAKAN STANDARD SARANA PRASARANA DAN STANDARD PENGELOLAAN MENGACU PADA STANDARD NASIONAL PENDIDIKAN DI SMK NEGERI SE-KOTA MADYA SURABAYA

Aris Setiawan

S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: nusantara.adem@gmail.com

Drs. Dewanto, M.Pd

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya
dewantokelik@yahoo.com

Abstrak

Peneliti melihat fenomena ketika melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL II) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kota madya Surabaya pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Terindikasi bahwa sekolah masih belum sepenuhnya memenuhi Standard Nasional Pendidikan (SNP). Kejadian tersebut mengakibatkan kurangnya kesiapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja baik dalam keahlian, penguasaan kompetensi kejuruan, serta sikap kerja yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan standard sarana prasarana dan standard pengelolaan dengan menggunakan instrumen akreditasi penelitian dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) Tahun 2009. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMK Negeri Se-Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 12 SMK Negeri. Sampel penelitian berdasarkan *purposive sampling* dan *cluster sampling* adalah SMKN 3, SMKN 5, dan SMKN 7 Surabaya tepatnya di Jurusan Teknik Mesin (Teknik Pemmesinan dan Teknik Kendaraan Ringan). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan berupa skoring sesuai dengan petunjuk teknis pada instrumen akreditasi BAN S/M. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang didukung dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan SNP di SMKN se-kota madya Surabaya masih terdapat komponen standard yang belum dipenuhi oleh lembaga sekolah. Peringkat akreditasi SMKN 3 Surabaya dengan skor 70 (C/Cukup Layak) untuk TPM dan 60 (C/Cukup Layak) untuk TKR pada standard sarana prasarana dan skor 74 (B/Layak) untuk standard pengelolaan. Peringkat akreditasi SMKN 5 Surabaya dengan skor 97 (A/Sangat Layak) pada standard sarana prasarana dan skor 71 (B/Layak) untuk standard pengelolaan. Peringkat akreditasi SMKN 7 Surabaya dengan skor 85 (B/Layak) untuk TPM dan 84 (B/Layak) untuk TKR pada standard sarana prasarana dan skor 89 (A/Sangat Layak) untuk TPM dan 91 (A/Sangat Layak) untuk TKR pada standard pengelolaan.

Kata kunci: SMK, Standard Sarana Prasarana, Standard Pengelolaan, Standard Nasional Pendidikan

Abstract

Researchers looked at the phenomenon when conducting Experience Program (PPL II) in one of the Vocational High School in Surabaya municipality in the semester of the school year 2013/2014. Indicated that the school is still not fully meet the National Standard of Education (SNP). The incident resulted in a lack of preparedness of vocational graduates entering the workforce both in skill, mastery of vocational competence, as well as a good working attitude. This study aims to determine the feasibility of infrastructure standards and management standards by using the instrument of accreditation study of BAN-S/M (National Accreditation Board for Schools / Madrasah) in 2009. The population in this study was the whole Se-SMK Surabaya Municipality consisting of 12 SMK. The study sample based on purposive sampling and cluster sampling is SMKN 3, SMKN 5, and SMKN 7 Surabaya precisely in the Department of Mechanical Engineering (Mechanical Machining and Mechanical Light Vehicle). Data analysis techniques in this study using a scoring calculation in accordance with the technical guidelines on the accreditation instrument BAN S/M. The study was conducted in the second semester of academic year 2013/2014. This study used a quantitative descriptive research, which is supported by conducting interviews and documentation. The results of this study indicate that the fulfillment of a SNP in SMK Surabaya municipality there are standard components that have not been met by the school institution. SMKN 3 Surabaya accreditation rating with a score of 70 (C/Pretty Decent) for TPM and 60 (C/Decent Enough) for TKR on the standard of infrastructure and a score of 74 (B/Worthy) to standard management. Rating 5 SMK Surabaya accreditation with a score of 97 (A/Very Worthy) on infrastructures and standard score of 71 (B/Worthy) to standard management. SMKN 7 Surabaya accreditation rating with a score of 85 (B/Worth) for TPM and 84 (B/Worth) for TKR on the standard of infrastructure and score 89 (A/Very Worthy) for TPM and 91 (A/Very Worthy) for TKR in management standards.

Keywords: vocational, Infrastructure Standard, Standard Management, National Standard of Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kegiatan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk kepribadian, watak, kecerdasan, dan keahlian agar dapat menjadi pribadi yang mandiri di tengah masyarakat serta membekali dengan nilai-nilai luhur agar dapat menempatkan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 pasal 15 dan pasal 18 SMK merupakan jenis pendidikan menengah. Sebagai lanjutan dari SD dan SMP mempunyai tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan Industri akan sumber daya manusia dalam bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu SMK dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional kerja.

Persaingan tenaga kerja profesional yang semakin meningkat dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015 menuntut SMK untuk benar-benar mempersiapkan lulusannya agar dapat bersaing dengan kesiapan dan kemampuan kerja yang baik. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wakil pemerintah yang membidangi pendidikan melalui Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (SNP) dan peraturan perundangan lain yang relevan menetapkan 8 standard mutu pendidikan yang terdiri dari: (1) Standard Kompetensi Lulusan, (2), Standard Isi, (3) Standard Proses, (4) Standard Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standard Sarana dan Prasarana, (6) Standard Pengelolaan, (7) Standard Pembiayaan, (8) Standard Penilaian Pendidikan yang di mana kedelapan standard tersebut menjadi tolok ukur dari setiap satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi proses pendidikan yang dilakukan.

Sekolah menengah kejuruan sebagai pendidikan formal yang mempunyai tugas menyediakan lulusan dan/atau sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan perkembangan pembangunan. Tercapainya tujuan SMK dalam menyediakan lulusan yang berkompeten di bidangnya tidak lepas dari pemenuhan standard

nasional pendidikan mengacu pada UU Sisdiknas pasal 35 ayat 2 tentang standard nasional pendidikan.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standard pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Untuk mengorganisir pelaksanaan pembelajaran diperlukan pengelolaan pembelajaran dengan efektif. Pembelajaran yang dikelola dengan manajemen yang efektif diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mengakar pada individu siswa.

Peneliti melihat fenomena ketika melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL II) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kota madya Surabaya pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Terindikasi bahwa tidak selalu menunjukkan relevansi dari setiap sekolah dalam memenuhi kedelapan standard tersebut sebagai standardisasi mutu pendidikan di Indonesia. Kejadian tersebut mengakibatkan kurangnya kesiapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja baik dalam keahlian, penguasaan kompetensi kejuruan, serta sikap kerja yang baik.

Berdasarkan hasil percakapan dengan beberapa guru dan siswa mengenai proses belajar mengajar di sekolah dan kondisi sekolah mengenai kesiapan pendukung proses pembelajaran bahwa sekolah dengan akreditasi yang baik belum tentu kenyataannya juga baik. Kejadian tersebut dirasa peneliti bukan sebagai masalah melainkan sebuah tantangan bagi kita semua yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk segera memperbaiki segala kesiapan pendukung dalam proses belajar mengajar.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penelitian tentang kelayakan standard sarana prasarana dan standard pengelolaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se-Kota Madya Surabaya. Tentunya kedua standard yang menjadi fokus penelitian tidak dapat terlepas dari standard lainnya. Peneliti menilai kedua standard ini menjadi faktor penting dalam proses belajar mengajar khususnya pada kesiapan pembelajaran dan proses pembelajaran di sekolah.

Lulusan SMK di seluruh wilayah Indonesia kebanyakan bekerja di dunia usaha dan industri. Kemajuan teknologi di segala bidang membuat lulusan SMK dituntut mempunyai keahlian di masing-masing bidang serta mampu menyesuaikan kemajuan teknologi yang digunakan dunia usaha dan industri. Maka dari itu dibutuhkan suatu komitmen dan tanggung jawab terhadap sistem pendidikan guna meningkatkan kemahiran akan kompetensi di bidang teknologi bagi siswa SMK.

Ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran di sekolah selain menjadi motivasi bagi setiap siswa juga menjadi faktor penting dalam

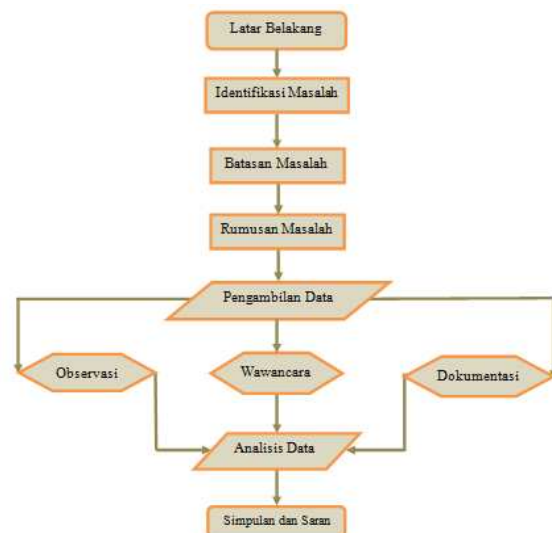
memperoleh tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai serta pengelolaan yang baik dalam setiap aspek pendukung untuk membantu proses belajar mengajar akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap kemajuan belajar siswa sehingga akan menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya. Semua itu bisa terjadi karena antara perencanaan pembelajaran dan kesiapan akan media pendukung relevan.

Ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah didukung oleh adanya pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu bertujuan agar dalam menggunakan sarana prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan di setiap aspek pendukung proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena akan sangat mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah.

Menyiapkan lulusan yang terampil dan profesional merupakan tantangan yang harus dijawab oleh SMK sebagai sekolah kejuruan yang mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Dari sisi lain kelengkapan sarana prasarana dan dengan didukung pengelolaan yang baik dapat berdampak positif bagi keberhasilan siswa dalam memperoleh informasi sebagai upaya untuk membentuk kompetensi keahlian di bidang profesi dan siap terjun ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu penelitian tentang kelayakan standard sarana prasarana dan standard pengelolaan mengacu pada standard nasional pendidikan di SMK Negeri Se-Kota Madya Surabaya ini perlu dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana kelayakan standard sarana prasarana pada jurusan teknik pemesinan dan teknik kendaraan ringan di SMKN 3, SMKN 5, dan SMKN 7 Surabaya mengacu pada standard Nasional pendidikan ?.
2. Bagaimana kelayakan standard pengelolaan pada jurusan teknik pemesinan dan teknik kendaraan ringan di SMKN 3, SMKN 5, dan SMKN 7 Surabaya mengacu pada standard Nasional pendidikan ?.



Gambar 3.1 Rancangan Penelitian

METODE

Berdasarkan dari fungsinya, penelitian tentang analisis kelayakan standard sarana prasarana dan standard pengelolaan ini termasuk jenis penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan data penunjang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan standard sarana prasarana dan standard pengelolaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMK Negeri di Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 12 SMK Negeri, tetapi dengan pertimbangan peneliti tentang ketidaksamaan jurusan atau program keahlian yang ada pada setiap sekolah, maka tidak dapat diteliti meskipun jumlahnya sudah diketahui. Jumlah Populasi Penelitian SMK Negeri Se-Kota Madya Surabaya di antaranya adalah SMKN 1 Surabaya, SMKN 2 Surabaya, SMKN 3 Surabaya, SMKN 4 Surabaya, SMKN 5 Surabaya, SMKN 6 Surabaya, SMKN 7 Surabaya, SMKN 8 Surabaya, SMKN 9 Surabaya, SMKN 10 Surabaya, SMKN 11 Surabaya, dan SMKN 12 Surabaya.

Penelitian ini dilakukan pada jurusan Teknik Kendaraan ringan (TKR) dan Teknik Pemesinan (TPm) di SMKN 3, SMKN 5, dan SMKN 7 Surabaya. Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yakni dengan memilih sampel dengan pertimbangan berdasarkan latar belakang program studi peneliti. Peneliti juga menggunakan *cluster sampling* untuk pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan, yakni dalam penelitian ini dilakukan pada jurusan Teknik Pemesinan (TPM) dan Teknik Kendaraan

Ringan (TKR) di SMKN 3 yang berada di wilayah Surabaya selatan, SMKN 5 yang berada di wilayah Surabaya timur, dan SMKN 7 yang berada di wilayah Surabaya pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. SMKN 3 Surabaya

Hasil penelitian yang didapat berupa data yang kemudian diolah dalam beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6 Skor Tertimbang Perolehan Standard Sarana Prasarana SMKN 3 Surabaya

No. Butir	Jawaban		Skor Butir Perolehan		Bobot butir	Skor Tertimbang Perolehan	
	TPM	TKR	TPM	TKR		TPM	TKR
1	B	B	3	3	3	9	9
2	B	B	3	3	3	9	9
3	A	D	4	1	3	12	3
4	B	B	3	3	3	9	9
5	C	D	2	1	3	6	3
6	B	B	3	3	4	12	12
7	A	B	4	3	4	16	12
8	A	A	4	4	4	16	16
9	C	C	2	2	4	8	8
10	A	B	4	3	3	12	9
11	B	B	3	3	4	12	12
12	E	E	0	0	3	0	0
13	C	C	2	2	4	8	8
14	B	B	3	3	3	9	9
15	B	B	3	3	4	12	12
16	B	B	3	3	3	9	9
17	C	C	2	2	2	4	4
18	C	C	2	2	3	6	6
19	C	C	2	2	3	6	6
20	B	B	3	3	3	9	9
21	B	B	3	3	3	9	9
22	B	B	3	3	3	9	9
23	E	E	0	0	3	0	0
24	E	E	0	0	3	0	0
25	A	A	4	4	3	12	12
Jumlah			65	59	81	223	195

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}}$$

x Bobot Komponen

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM} = \frac{223}{324} \times 13 = 8,947$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR} = \frac{195}{324} \times 13 = 7,824$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi TPM Skala Ratusan} &= \frac{8,947}{13} \times 100 = 68,82 \\ &= 69 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi TKR Skala Ratusan} &= \frac{7,824}{13} \times 100 \\ &= 60,18 \\ &= 60 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Tabel 4.7 Skor Tertimbang Perolehan Standard Pengelolaan SMKN 3 Surabaya

No. Butir	Jawaban		Skor Butir Perolehan		Bobot butir	Skor Tertimbang Perolehan	
	TPM	TKR	TPM	TKR		TPM	TKR
1	B	B	3	3	4	12	12
2	B	B	3	3	4	12	12
3	B	B	3	3	3	9	9
4	C	C	2	2	3	6	6
5	A	A	4	4	3	12	12
6	A	A	4	4	3	12	12
7	B	B	3	3	3	9	9
8	A	A	4	4	2	8	8
9	A	A	4	4	3	12	12
10	A	A	4	4	3	12	12
11	A	A	4	4	4	16	16
12	A	A	4	4	3	12	12
13	A	A	4	4	4	16	16
14	A	A	4	4	3	12	12
15	A	A	4	4	4	16	16
16	A	A	2	2	3	6	6
17	A	A	3	3	3	9	9
18	E	E	0	0	3	0	0
19	D	D	1	1	2	2	2
20	A	A	4	4	3	12	12
21	E	E	0	0	2	0	0
22	A	A	4	4	3	12	12
23	E	E	0	0	3	0	0
24	A	A	4	4	3	12	12
25	A	A	4	4	3	12	12
26	B	B	3	3	3	9	9
Jumlah			79	79	80	238	238

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}}$$

x Bobot Komponen

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM} = \frac{238}{320} \times 10 = 7,437$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR} = \frac{238}{320} \times 10 = 7,437$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi TPM Skala Ratusan} &= \frac{7,437}{10} \times 100 \\ &= 74,375 \end{aligned}$$

$$= 74 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi TKR Skala Ratusan} &= \frac{7,437}{10} \times 100 \\ &= 74,375 \\ &= 74 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Tabel 4.11 Skor Tertimbang Perolehan Standard Sarana Prasarana SMKN 5 Surabaya

No. Butir	Jawaban		Skor Butir Perolehan		Bobot butir	Skor Tertimbang Perolehan	
	TPM	TKR	TPM	TKR		TPM	TKR
1	A	A	4	4	3	12	12
2	A	A	4	4	3	12	12
3	A	A	4	4	3	12	12
4	A	A	4	4	3	12	12
5	A	A	4	4	3	12	12
6	A	A	4	4	4	16	16
7	A	A	4	4	4	16	16
8	A	A	4	4	4	16	16
9	A	A	4	4	4	16	16
10	A	A	4	4	3	12	12
11	A	A	4	4	4	16	16
12	A	A	4	4	3	12	12
13	A	A	4	4	4	16	16
14	A	A	4	4	3	12	12
15	A	A	4	4	4	16	16
16	A	A	4	4	3	12	12
17	A	A	4	4	2	8	8
18	A	A	4	4	3	12	12
19	A	A	4	4	3	12	12
20	A	A	4	4	3	12	12
21	A	A	4	4	3	12	12
22	A	A	4	4	3	12	12
23	E	E	0	0	3	0	0
24	E	E	0	0	3	0	0
25	A	A	4	4	3	12	12
Jumlah			92	92	81	316	316

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}}$$

x Bobot Komponen

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM} = \frac{316}{324} \times 13 = 12,679$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR} = \frac{316}{324} \times 13 = 12,679$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM Skala Ratusan} = \frac{12,679}{13} \times 100$$

$$= 97,53$$

$$= 97 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR Skala Ratusan} = \frac{12,679}{13} \times 100$$

$$= 97,53$$

$$= 97 \text{ (dibulatkan)}$$

Tabel 4.12 Skor Tertimbang Perolehan Standard Pengelolaan SMKN 5 Surabaya

No. Butir	Jawaban		Skor Butir Perolehan		Bobot butir	Skor Tertimbang Perolehan	
	TPM	TKR	TPM	TKR		TPM	TKR
1	A	A	4	4	4	12	12
2	A	A	4	4	4	12	12
3	B	B	3	3	3	9	9
4	A	A	4	4	3	6	6
5	D	D	1	1	3	12	12
6	D	D	1	1	3	12	12
7	A	A	4	4	3	9	9
8	A	A	4	4	2	8	8
9	A	A	4	4	3	12	12
10	A	A	4	4	3	12	12
11	A	A	4	4	4	16	16
12	E	E	0	0	3	0	0
13	A	A	4	4	4	16	16
14	A	A	4	4	3	12	12
15	A	A	4	4	4	16	16
16	A	A	4	4	3	6	6
17	A	A	4	4	3	9	9
18	E	E	0	0	3	0	0
19	E	E	0	0	2	2	2
20	A	A	4	4	3	12	12
21	E	E	0	0	2	0	0
22	A	A	4	4	3	12	12
23	A	A	4	4	3	0	0
24	A	A	4	4	3	12	12
25	A	A	4	4	3	12	12
26	A	A	4	4	3	12	12
Jumlah			76	76	80	229	229

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}}$$

x Bobot Komponen

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM} = \frac{229}{320} \times 10 = 7,156$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR} = \frac{229}{320} \times 10 = 7,156$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM Skala Ratusan} = \frac{7,156}{10} \times 100$$

$$= 71,56$$

$$= 71 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR Skala Ratusan} = \frac{7,156}{10} \times 100$$

$$= 71,56$$

$$= 71 \text{ (dibulatkan)}$$

Tabel 4.16 Skor Tertimbang Perolehan Standard Sarana Prasarana SMKN 7 Surabaya

No. Butir	Jawaban		Skor Butir Perolehan		Bobot butir	Skor Tertimbang Perolehan	
	TPM	TKR	TPM	TKR		TPM	TKR
1	B	B	3	3	3	9	9
2	A	B	4	3	3	12	9
3	A	A	4	4	3	12	12
4	A	A	4	4	3	12	12
5	B	B	3	3	3	6	9
6	A	A	4	4	4	16	16
7	A	A	4	4	4	16	16
8	A	A	4	4	4	16	16
9	B	B	3	3	4	12	12
10	A	A	4	4	3	12	12
11	B	B	3	3	4	12	12
12	A	A	4	4	3	16	12
13	A	A	4	4	4	16	16
14	B	B	3	3	3	9	9
15	B	B	3	3	4	13	12
16	B	B	3	3	3	9	9
17	B	B	3	3	2	6	6
18	A	A	4	4	3	12	12
19	A	A	4	4	3	12	12
20	A	A	4	4	3	12	12
21	A	A	4	4	3	12	12
22	A	A	4	4	3	12	12
23	E	E	0	0	3	0	0
24	E	E	0	0	3	0	0
25	A	A	4	4	3	12	12
Jumlah			84	83	81	276	271

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM Skala Ratusan} = \frac{11,074}{13} \times 100$$

$$= 85,184$$

$$= 85 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR Skala Ratusan} = \frac{10,873}{13} \times 100$$

$$= 83,638$$

$$= 84 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}}$$

x Bobot Komponen

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM} = \frac{276}{324} \times 13 = 11,074$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR} = \frac{271}{324} \times 13 = 10,873$$

Tabel 4.17 Skor Tertimbang Perolehan Standard Pengelolaan SMKN 7 Surabaya

No. Butir	Jawaban		Skor Butir Perolehan		Bobot butir	Skor Tertimbang Perolehan	
	TPM	TKR	TPM	TKR		TPM	TKR
1	A	A	4	4	4	16	16
2	A	A	4	4	4	16	16
3	B	B	3	3	3	9	9
4	B	B	3	3	3	9	9
5	A	A	4	4	3	12	12
6	C	C	2	2	3	6	12
7	A	A	4	4	3	12	12
8	A	A	4	4	2	8	8
9	A	A	4	4	3	12	12
10	A	A	4	4	3	12	12
11	A	A	4	4	4	16	16
12	A	A	4	4	3	12	12
13	A	A	4	4	4	16	16
14	A	A	4	4	3	12	12
15	A	A	4	4	4	16	16
16	B	B	3	3	3	9	9
17	A	A	4	4	3	12	12
18	E	E	0	0	3	0	0
19	D	D	1	1	2	2	2
20	A	A	4	4	3	12	12
21	A	A	4	4	2	8	8
22	A	A	4	4	3	12	12
23	A	A	4	4	3	12	12
24	A	A	4	4	3	12	12
25	A	A	4	4	3	12	12
26	B	B	3	3	3	9	9
Jumlah			91	91	80	284	290

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}}$$

x Bobot Komponen

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM} = \frac{284}{320} \times 10 = 8,875$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR} = \frac{290}{320} \times 10 = 9,062$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TPM Skala Ratusan} = \frac{8,875}{10} \times 100$$

$$= 88,75$$

$$= 89 \text{ (dibulatkan)}$$

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi TKR Skala Ratusan} = \frac{9,062}{10} \times 100$$

$$= 90,62$$

$$= 91 \text{ (dibulatkan)}$$

PEMBAHASAN

1. SMKN 3 Surabaya

Pengambilan data di SMKN 3 menemui kendala karena hanya sedikit saja dokumen yang diberikan pihak sekolah kepada peneliti. Ada yang

beralasan dengan menjawab tidak ada dan ada yang tidak mau memberikan dengan alasan ribet kalau mau nyari dokumen. Hal tersebut dikarenakan kepengurusan sekolah baru saja ada perombakan sehingga yang menjabat sekarang merasa data yang kami butuhkan adalah bukan hasil kinerja kepengurusan yang baru sehingga dokumen sekolah serasa disembunyikan. Oleh karena itu peneliti menggali informasi selain dengan WaKaSek juga dengan ketua jurusan TPM dan TKR serta menggali informasi dari dokumen yang jurusan miliki meski hanya sedikit dokumen yang diberikan.

a. Standard sarana prasarana

- 1) Luas lahan minimum untuk 7-9 rombel dengan bangunan dua lantai adalah 2793,6 m² (Sumber: BSNP), sedangkan pada kenyataan luas total sekolah 9365 m² dibagi enam jurusan adalah 1560 m². Jadi SMKN 3 Surabaya memiliki luas lahan 51% - 75% dari ketentuan luas lahan minimal. Luas lahan yang dimiliki akan berpengaruh pada pemanfaatan lahan salah satunya adalah pengurangan pemanfaatan lahan contohnya yaitu ruang terbuka hijau yang minim bagi siswa sehingga tidak ada tempat untuk sekedar bersantai yang nyaman karena luas lahan yang dimiliki hanya diperuntukan untuk bangunan sekolah dan lapangan saja.
- 2) Sekolah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya, terhindar dari gangguan pencemaran air dan udara, akan tetapi pada jurusan TKR masih ada potensi gangguan kebisingan karena untuk sementara berada di ruangan darurat yaitu di aula dan bengkel TKR dijadikan satu ruangan. Disamping itu kedua jurusan masih belum memiliki akses darurat dan pemadam kebakaran. Seharusnya program keahlian menyediakan tabung pemadam kebakaran dan jalur evakuasi untuk masyarakat sekolah agar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan akan ada sebuah kesiapan untuk menanggulangi.
- 3) Sekolah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya akan tetapi belum memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. Informasi tersebut peneliti dapat dari WaKaSek SarPras beliau bilang tidak ada dokumen tentang itu. Pihak sekolah seharusnya memiliki dokumen tentang izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sehingga pada suatu saat jika ada pihak tertentu atau ahli waris yang menanyakan tentang status tanah sekolah bisa menunjukkan bukti yang legal.
- 4) Sekolah masih belum memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukannya serta belum memiliki rencana kerja pemeliharaan gedung secara berkala. Setiap sekolah dalam membangun atau mendirikan gedung untuk proses belajar mengajar harus melalui prosedur yang ada salah satu contoh adalah mengenai izin mendirikan bangunan, di SMKN 3 waktu

peneliti singgung masalah izin mendirikan bangunan dan dijawab oleh WaKaSek sarpras tidak ada izin mendirikan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat penting dimiliki oleh pihak yang akan mendirikan bangunan dalam hal ini adalah sekolah karena kalau tidak ada IMB dan bangunan sekolah sudah berdiri yang ditakutkan adalah bangunan berdiri diatas tanah sengketa atau bangunan berdiri di luar dari ruang tata kota sehingga bangunan sekolah tersebut bisa saja digusur atau dipindahkan.

- 5) Kondisi sanitasi sekolah cukup baik karena disebelah sekolah ada selokan yang cukup besar, akan tetapi pada bagian yang lain sekolah masih belum ada sanitasi yang memadai karena penyerapan air yang dibuat sekolah berbentuk sumur tidak berfungsi dengan semestinya karena sudah penuh.
 - 6) Ruang penunjang berdasarkan penelitian sudah sebagian dimiliki oleh sekolah begitu juga sarana dari ruang penunjang itu sendiri akan tetapi yang perlu dikaji ulang adalah mengenai ruang organisasi siswa yang hanya dimiliki oleh osis saja. Disamping itu ketersediaan kamar mandi di sekolah seharusnya adalah berbanding 1:40 (Sumber: BSNP) dan di SMKN 3 berdasarkan penelitian kurang karena hanya mempunyai 6 kamar mandi dari 51 rombel dan 2 dari 6 kurang tersedianya fasilitas kamar mandi yaitu dengan tidak adanya kunci pintu dan sarana kamar mandi seperti gantungan dan lampu. Apabila sekolah dalam penyediaan kamar mandi kurang maka akan terjadi antrean siswa dan konsentrasi siswa juga akan terganggu. Seharusnya pihak sekolah menyediakan prasarana tersebut sehingga siswa atau masyarakat sekolah bisa nyaman dalam pemanfaatan dan penggunaannya.
 - 7) Sekolah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan berbagai kegiatan salah satunya adalah mengadakan bursa kerja di sekolah. Setiap sekolah seharusnya memiliki wadah mengenai *business center* untuk melatih dan mengembangkan jiwa wirausaha siswa, di SMKN 3 sementara ini belum memiliki wadah tersebut. Seharusnya sekolah menyediakan wadah untuk *business center* agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja melainkan juga memiliki kemampuan atau jiwa berwirausaha yang baik pula.
- b. Standard Pengelolaan
- 1) Sekolah sudah mempunyai visi dan misi sekolah serta mempunyai rencana kerja tahunan dan empat tahunan, akan tetapi masih belum ada sosialisasi untuk rencana kerja sekolah, hal ini dibuktikan peneliti melalui wawancara dengan beberapa guru dan melihat langsung di lingkungan sekolah akan tetapi belum menemukan bentuk sosialisasi untuk

rencana kerja sekolah. Sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat sekolah mengetahui arah dan tujuan sekolah melalui rencana kerja yang ada dan disosialisasikan. Dengan begitu masyarakat sekolah sedikit banyak akan membantu tercapainya rencana kerja yang dimiliki sekolah. Fungsi dari sosialisasi tersebut juga agar pihak sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak keluar dari apa yang sudah dirumuskan sebelumnya melalui rencana kerja dan/atau visi dan misi yang dimiliki sekolah.

- 2) Program keahlian sudah memiliki struktur organisasi itu dibuktikan peneliti dengan adanya struktur organisasi yang disosialisasikan di ruang jurusan serta adanya dokumen program kerja tahunan dan usaha program keahlian mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran akan tetapi masih belum ada uraian tugas yang jelas. Seharusnya di dalam struktur organisasi juga dicantumkan uraian tugas dan mekanisme kerja sehingga para pemegang tanggung jawab tidak lupa dengan tanggung jawab yang sudah diamanahkan dan mengetahui bagaimana cara memulai pekerjaannya dengan adanya mekanisme kerja yang ada.
- 3) Program keahlian melaksanakan pendayagunaan pendidik dengan mengikuti pendidik untuk mengikuti pelatihan di bidang akademik masing-masing contohnya pelatihan CNC, autocad, bubut konvensional, dan lain-lain. Semua hal tersebut dilakukan agar kompetensi pendidik ada perkembangan dan *up to date* dalam perkembangan teknologi.
- 4) Program keahlian sudah menciptakan lingkungan yang kondusif serta mengelola sarana prasarana dengan cara kerja bakti tiap satu minggu sekali secara rutin, akan tetapi untuk masalah pengelolaan pembiayaan masih menganut pada birokrasi pusat sekolah. Seharusnya program keahlian bisa dan mampu mengelola pembiayaan di jurusan dan tidak mengandalkan birokrasi pusat saja. Kenapa harus begitu, karena yang tahu dan paham akan kebutuhan program keahlian adalah program keahlian itu sendiri.
- 5) Program keahlian belum bisa memaksimalkan program pengawasan dan evaluasi diri dan evaluasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian pimpinan sekolah akan proses belajar mengajar di kelas dan dengan wawancara ke beberapa guru di sekolah. Seharusnya ada perhatian khusus yang diberikan pimpinan sekolah tentang proses belajar mengajar di sekolah sehingga ada motivasi bagi pendidik dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

2. SMKN 5 Surabaya

a. Standard sarana prasarana

Pengambilan data di SMKN 7 sangat terbantu oleh pihak sekolah, karena mereka rasa bentuk evaluasi dalam hal masukan sangat mereka butuhkan. Skor yang didapat juga sangat baik hanya saja untuk masalah *business center* sekolah atau program keahlian memang menyadari belum adanya wadah untuk itu. Kemudian untuk pengelolaan ada sedikit evaluasi mengenai struktur organisasi, pengolahan pembiayaan, dan evaluasi tenaga kependidikan.

- 1) Luas lahan minimum untuk 7-9 rombongan dengan bangunan dua lantai adalah 2793,6 m², sedangkan dengan luas total sekolah 47,656 m² dibagi enam jurusan adalah 6808. Jadi SMKN 5 Surabaya memiliki luas lahan 76% - 100% dari ketentuan luas lahan minimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekolah sehingga ada tempat yang nyaman dan sekedar bersantai di sekolah.
- 2) Ruang penunjang berdasarkan penelitian sudah sebagian dimiliki oleh sekolah begitu juga sarana dari ruang penunjang itu sendiri akan tetapi yang perlu dikaji ulang adalah mengenai ruang organisasi siswa yang hanya dimiliki oleh osis saja. Disamping itu ketersediaan kamar mandi di sekolah seharusnya adalah berbanding 1:40 (sumber BSNP) dan di SMKN 5 dirasa kurang karena hanya mempunyai 27 kamar mandi dari 63 rombongan yang seharusnya ada 47 kamar mandi. Apabila sekolah dalam penyediaan kamar mandi kurang maka akan terjadi antrean siswa dan konsentrasi siswa juga akan terganggu. Seharusnya pihak sekolah menyediakan prasarana tersebut sehingga siswa atau masyarakat sekolah bisa nyaman dalam pemanfaatan dan penggunaannya.
- 3) Sekolah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan berbagai kegiatan salah satunya adalah mengadakan bursa kerja di sekolah. Setiap sekolah seharusnya memiliki wadah mengenai *business center* untuk melatih dan mengembangkan jiwa wirausaha siswa, di SMKN 5 sementara ini belum memiliki wadah tersebut. Seharusnya sekolah menyediakan wadah untuk *business center* agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja

melainkan juga memiliki kemampuan atau jiwa berwirausaha yang baik pula.

b. Standard pengelolaan

- 1) Sekolah sudah mempunyai visi dan misi sekolah serta mempunyai rencana kerja tahunan dan empat tahunan, dan sudah ada sosialisasi untuk rencana kerja sekolah. Hal ini dibuktikan peneliti melalui wawancara dengan beberapa guru dan melihat langsung di lingkungan sekolah. Sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat sekolah mengetahui arah dan tujuan sekolah melalui rencana kerja yang ada dan disosialisasikan. Dengan begitu masyarakat sekolah sedikit banyak akan membantu tercapainya rencana kerja yang dimiliki sekolah. Fungsi dari sosialisasi tersebut juga agar pihak sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak keluar dari apa yang sudah dirumuskan sebelumnya melalui rencana kerja dan/atau visi dan misi yang dimiliki sekolah.
- 2) Struktur organisasi program keahlian seharusnya juga menjelaskan uraian tugas dan mekanisme kerja, di SMKN 5 sudah baik akan tetapi perlu digambarkan lagi uraian tugas dan mekanisme kerjanya. Seharusnya di dalam struktur organisasi juga dicantumkan uraian tugas dan mekanisme kerja sehingga para pemegang tanggung jawab tidak lupa dengan tanggung jawab yang sudah diamanahkan dan mengetahui bagaimana cara memulai pekerjaannya dengan adanya mekanisme kerja yang ada.
- 3) Program keahlian sudah menciptakan lingkungan yang kondusif serta mengelola sarana prasarana dengan cara kerja bakti tiap satu minggu sekali secara rutin akan tetapi untuk masalah pengelolaan pembiayaan masih menganut pada birokrasi pusat sekolah dan untuk masalah pengelolaan pembiayaan program keahlian cenderung menyerahkan ke administrasi sekolah dan program keahlian hanya eksekusi dalam hal pembelanjaan saja. Kenapa program keahlian yang seharusnya mengelola pembiayaan program keahlian, karena yang tahu dan paham akan kebutuhan program keahlian adalah program keahlian itu sendiri.
- 4) Program keahlian belum bisa memaksimalkan program pengawasan

dan evaluasi diri dan evaluasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Ini dibuktikan dengan wawancara kepada ketua jurusan dan beliau menjawab tidak ada. Seharusnya ada perhatian khusus yang diberikan pimpinan sekolah tentang proses belajar mengajar di sekolah sehingga ada motivasi bagi pendidik dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

3. SMKN 7 Surabaya

Pengambilan data di SMKN 7 sangat terbantu oleh pihak sekolah karena mereka rasa bentuk evaluasi dalam hal masukan sangat mereka butuhkan. Skore yang didapat juga sangat baik hanya saja untuk masalah *business center* sekolah atau program keahlian memang menyadari belum adanya wadah untuk itu. Kemudian untuk pengelolaan ada sedikit evaluasi mengenai struktur organisasi, pengolahan pembiayaan, dan evaluasi tenaga kependidikan.

a. Standard sarana prasarana

- 1) Luas lahan minimum untuk 7-9 rombongan dengan bangunan dua lantai adalah 2793,6 m², sedangkan dengan luas total sekolah 18,278 m² dibagi enam jurusan adalah 2611 m². Jadi SMKN 7 Surabaya memiliki luas lahan 76% - 100% dari ketentuan luas lahan minimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekolah sehingga ada tempat yang nyaman dan sekedar bersantai di sekolah.
- 2) Ruang penunjang berdasarkan penelitian sudah sebagian dimiliki oleh sekolah begitu juga sarana dari ruang penunjang itu sendiri akan tetapi yang perlu dikaji ulang adalah mengenai ruang organisasi siswa yang hanya dimiliki oleh osis saja. Disamping itu ketersediaan kamar mandi di sekolah seharusnya adalah berbanding 1:40 (sumber BSNP) dan di SMKN 7 dirasa kurang karena hanya mempunyai 9 kamar mandi dari 63 rombongan yang seharusnya ada 47 kamar mandi. Apabila sekolah dalam penyediaan kamar mandi kurang maka akan terjadi antrean siswa dan konsentrasi siswa juga akan terganggu. Seharusnya pihak sekolah menyediakan prasarana tersebut sehingga siswa atau masyarakat sekolah bisa nyaman dalam pemanfaatan dan penggunaannya.
- 3) Setiap sekolah seharusnya memiliki wadah mengenai *business center*, di SMKN 7 sementara ini belum memiliki wadah tersebut. Seharusnya sekolah menyediakan wadah untuk *business center* agar siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja melainkan juga memiliki

kemampuan atau jiwa berwirausaha yang baik pula.

b. Standard pengelolaan

- 1) Sekolah sudah mempunyai visi dan misi sekolah serta mempunyai rencana kerja tahunan dan empat tahunan, dan sudah ada sosialisasi untuk rencana kerja sekolah. Hal ini dibuktikan peneliti melalui wawancara dengan beberapa guru dan melihat langsung di lingkungan sekolah. Sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat sekolah mengetahui arah dan tujuan sekolah melalui rencana kerja yang ada dan disosialisasikan. Dengan begitu masyarakat sekolah sedikit banyak akan membantu tercapainya rencana kerja yang dimiliki sekolah. Fungsi dari sosialisasi tersebut juga agar pihak sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak keluar dari apa yang sudah dirumuskan sebelumnya melalui rencana kerja dan/atau visi dan misi yang dimiliki sekolah.
- 2) Struktur organisasi program keahlian seharusnya juga menjelaskan uraian tugas dan mekanisme kerja, di SMKN 7 sudah baik akan tetapi perlu digambarkan lagi uraian tugas dan mekanisme kerjanya. Seharusnya di dalam struktur organisasi juga dicantumkan uraian tugas dan mekanisme kerja sehingga para pemegang tanggung jawab tidak lupa dengan tanggung jawab yang sudah diamanahkan dan mengetahui bagaimana cara memulai pekerjaannya dengan adanya mekanisme kerja yang ada.
- 3) Program keahlian sudah menciptakan lingkungan yang kondusif serta mengelola sarana prasarana dengan cara kerja bakti tiap satu minggu sekali secara rutin akan tetapi untuk masalah pengelolaan pembiayaan masih menganut pada birokrasi pusat sekolah dan cenderung menyerahkan ke administrasi sekolah. Kenapa program keahlian yang seharusnya mengelola pembiayaan program keahlian, karena yang tahu dan paham akan kebutuhan program keahlian adalah program keahlian itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standard Sarana Prasarana dan Standard Pengelolaan di SMKN 3 Surabaya
 - a. Standard sarana prasarana di SMKN 3 Surabaya memperoleh nilai akhir komponen akreditasi skala ratusan pada jurusan TPM sebesar 70 dan pada jurusan TKR sebesar 60.

Berdasarkan tabel 3.4 Interpretasi maka diperoleh kriteria CUKUP LAYAK. Kriteria tersebut bisa naik menjadi layak kalau pihak sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti masalah izin mendirikan bangunan, izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, ketersediaan RP (kamar mandi dan ruang organisasi), akses darurat, dan wadah *business center*.

- b. Standard pengelolaan di SMKN 3 Surabaya memperoleh nilai akhir komponen akreditasi skala ratusan pada jurusan TPM dan TKR sebesar 74. Berdasarkan tabel 3.4 Interpretasi maka diperoleh kriteria LAYAK. Kriteria tersebut bisa naik menjadi sangat layak kalau sekolah atau program keahlian memperhatikan dan menindaklanjuti masalah program kerja yang disosialisasikan, pengolahan pembiayaan, mitra kerja untuk magang guru, dan program pengawasan yang dioptimalkan.
2. Standard Sarana Prasarana dan Standard Pengelolaan di SMKN 5 Surabaya
 - a. Standard sarana prasarana di SMKN 5 Surabaya memperoleh nilai akhir komponen akreditasi skala ratusan pada jurusan TPM dan TKR sebesar 97. Berdasarkan tabel 3.4 Interpretasi maka diperoleh kriteria SANGAT LAYAK. Skor tersebut bisa lebih tinggi lagi kalau *business center* dan ruang penunjang (kamar mandi dan ruang organisasi) diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh sekolah.
 - b. Standard pengelolaan di SMKN 5 Surabaya memperoleh nilai akhir komponen akreditasi skala ratusan pada jurusan TPM dan TKR sebesar 71. Berdasarkan tabel 3.4 Interpretasi maka diperoleh kriteria LAYAK. Kriteria tersebut bisa lebih baik lagi kalau masalah struktur organisasi yang jelas, sosialisasi rencana kerja, pengolahan pembiayaan, dan pengawasan tenaga kependidikan diperhatikan dan ditindaklanjuti.
3. Standard Sarana Prasarana dan Standard Pengelolaan di SMKN 7 Surabaya
 - a. Standard sarana prasarana di SMKN 7 Surabaya memperoleh nilai akhir komponen akreditasi skala ratusan pada jurusan TPM sebesar 86 dan pada jurusan TKR sebesar 84. Berdasarkan tabel 3.4 Interpretasi maka diperoleh kriteria SANGAT LAYAK untuk jurusan TPM dan LAYAK untuk jurusan TKR. Kriteria tersebut bisa meningkat kalau pihak sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti ruang penunjang (kamar mandi dan ruang organisasi) dan *business center* untuk mengembangkan jiwa wirausaha siswa.
 - b. Standard pengelolaan di SMKN 7 Surabaya memperoleh nilai akhir komponen akreditasi skala ratusan pada jurusan TPM sebesar 89 dan TKR sebesar 91. Berdasarkan tabel 3.4

Interpretasi maka diperoleh kriteria SANGAT LAYAK. Skore tersebut bisa lebih tinggi kalau pihak sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti masalah kejelasan struktur organisasi (mekanisme kerja), pengelolaan pembiayaan program keahlian dan *business center*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi 1990. Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayu Prasetya Devi 2011. Manajemen Pendidikan Kejuruan. (<http://theboxofgory.blogspot.com/2011/11/manajemen-pendidikan-kejuruan.html>, diakses 10 Desember 2013).
- Badan Standard Nasional Pendidikan, 2011. Rancangan Standard Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana dan Profesi.
- Barnawi dan Arifin M 2012. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang nomor 20 tentang system pendidikan Nasional Jakarta.
- Fattah Nanang 2009. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handoko, Hani, T. 1995. Manajemen Yogyakarta: BPFE
- Kadarman SJ, AM, dan Jusuf Udaya 1995. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka.
- Mulyono 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Presiden RI. 2013. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2008. Standard Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2007. Standard Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri RI No. 19, 2005. Standard Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri No. 47, 2008. Wajib Belajar.
- Peraturan Menteri No. 17, 2010. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63, 2009. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, 2012. Pedoman Pemenuhan Standard Nasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Kemendikbud.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2007). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sumidjo Wahyu (1999). Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supadi, Dewanto, Budiharjo, (2010). Panduan penulisan skripsi program S-1. Surabaya: Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.
- Suryo subroto B. Tanpa tahun. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.